

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI KOTA
BUKITTINGGI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

RENZA YURI IKHWAN

NIM : 2220123010

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI KOTA BUKITTINGGI

(Renza Yuri Ikhwan, 2220123010, Fakultas Hukum Unand, 2024, 99 Halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH & Dr. Wetria Fauzi, SH., MH)

ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi yang mana kewajiban tersebut tidak diatur di dalam UUJN. Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan pemilik manfaat suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan pemilik manfaat haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran notaris dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Perseroan Terbatas? Bagaimana perlindungan hukum Notaris dalam Pengungkapan Pemilik Manfaat dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum Perseroan Terbatas? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 mengharuskan korporasi untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melaporkan informasi tentang pemilik manfaat kepada instansi berwenang, sementara notaris dapat berperan dalam proses ini jika diberi kuasa oleh korporasi. Kewajiban utama tetap pada korporasi untuk memperoleh dan melaporkan informasi tersebut. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat selama lima tahun, tetapi tidak secara aktif memutakhirkan data—sebaliknya, hal ini bergantung pada disiplin korporasi dalam melaporkan perubahan. Dengan demikian, peraturan ini memperjelas peran notaris dan menegaskan tanggung jawab utama korporasi dalam memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip mengenali pemilik manfaat. Notaris menghadapi risiko hukum yang signifikan terkait dengan kewajiban mereka dalam memverifikasi dan melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat dalam AHU-Online, terutama dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mereka harus memverifikasi keakuratan data dan dapat terkena sanksi jika informasi yang diberikan tidak benar, meskipun mereka berusaha melindungi diri melalui surat pernyataan dari klien dan due diligence. Untuk melaporkan transaksi mencurigakan, notaris menggunakan aplikasi GoAML yang dikembangkan oleh PPATK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pelapor dengan menjamin kerahasiaan identitas mereka serta melindungi mereka dari tuntutan pidana dan perdata terkait laporan mereka. Perlindungan ini juga mencakup jaminan keamanan pribadi dan keluarganya, serta memastikan bahwa identitas pelapor tidak akan terungkap selama proses hukum berlangsung.

Kata Kunci : Notaris, Perseroan Terbatas, Pemilik Manfaat

**IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 13 OF 2018
CONCERNING THE PRINCIPLE OF IDENTIFYING BENEFICIARY OWNERS IN
THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY BY A NOTARY IN
THE CITY OF BUKITTINGGI**

(Renza Yuri Ikhwan, 2220123010, Faculty of Law, University of Andalas, 2024, 99 Pages)
(Supervisors: Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH & Dr. Wetria Fauzi, SH., MH)

ABSTRACT

A notary, as a public official, has the obligation to apply the principle of identifying the beneficial owner of a corporation, which is not regulated by the Notary Law (UUJN). On one hand, notaries play a crucial role in the disclosure of beneficial owners of a corporation; on the other hand, transparency in disclosing beneficial owners must be based on honest and clear information from the representatives of the corporation. This is because the existence of beneficial owners (Beneficial Ownership) cannot be fully detected by the notary. The research questions of this study are: What is the role of the notary in implementing Presidential Regulation No. 13 of 2018 on the Principle of Identifying Beneficial Ownership in the establishment of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas)? How is the legal protection of notaries in the disclosure of beneficial ownership in the application of the principle of identifying beneficial owners in the establishment of a Limited Liability Company? The method used in this research is Juridical Empirical. Presidential Regulation No. 13 of 2018 requires corporations to identify, verify, and report information about beneficial owners to the relevant authorities, while notaries can play a role in this process if authorized by the corporation. The primary obligation remains with the corporation to obtain and report this information. Notaries also have the responsibility to keep documents related to beneficial ownership for five years but do not actively update the data—this depends on the corporation's discipline in reporting changes. Thus, this regulation clarifies the notary's role and emphasizes the corporation's primary responsibility in ensuring transparency and compliance with the principle of identifying beneficial owners. Notaries face significant legal risks related to their obligations in verifying and reporting information about beneficial owners in AHU-Online, especially in the context of money laundering (TPPU). They must verify the accuracy of the data and may face sanctions if the provided information is incorrect, even though they try to protect themselves through client statements and due diligence. To report suspicious transactions, notaries use the GoAML application developed by PPATK. Law No. 8 of 2010 provides legal protection for notaries as reporters by ensuring the confidentiality of their identities and protecting them from criminal and civil claims related to their reports. This protection also includes guarantees for personal and family safety and ensures that the reporter's identity remains confidential throughout the legal process.

Keywords: Notary, Limited Liability Company, Beneficial Owner